

**RESTRUKTURISASI PERBANKAN SYARIAH BERMASALAH
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN
PERSPEKTIF *AẒ-ẒARĪ'AH***



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD AUFARUL MAWAHIB, S.HI.

NIM: 1520310008

PEMBIMBING:

Dr. H. FUAD, M.A.

Dr. H. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Mawahib, Muhammad AUFARUL, 1520310008, Restrukturisasi Perbankan Syariah Bermasalah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Perspektif *az-Zarī'ah*, Tesis, Program Magister Hukum Islam Kosentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing I Dr. H. Fuad, MA., Pembimbing II Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag.

Kata Kunci: Restrukturisasi Perbankan, Bank Syariah, *az-Zarī'ah*

Ekonomi Syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Seiring pertumbuhannya, masalah yang dihadapi bank syariah semakin berat, serta karena seiring perkembangannya bank syariah bisa menjadikannya sebagai bank sistemik, yaitu bank yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian karena banyaknya aset yang dimiliki. Untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil, pemerintah selaku regulator mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Berdasarkan UU PPKSK dijelaskan mengenai pencegahan krisis dan juga bentuk penanganannya apabila usaha pencegahan tidak berhasil, yaitu dengan program restrukturisasi perbankan. Namun dalam UU PPKSK belum diatur mengenai tata cara pelaksanaannya, serta belum pernah terjadi restrukturisasi perbankan syariah bermasalah. Sehingga tingkat efektivitas program restrukturisasi perbankan syariah bermasalah belum dapat diketahui. Kemudian yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah apakah program restrukturisasi perbankan efektif diterapkan untuk menangani perbankan syariah bermasalah berdasarkan tinjauan teori *az-zarī'ah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, yaitu dengan menggunakan UU PPKSK.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa program restrukturisasi perbankan dalam UU PPKSK dapat diterapkan dalam menangani permasalahan bank syariah bermasalah secara efektif, hal tersebut dapat dilihat dari contoh-contoh restrukturisasi aset dengan cara merger, konsolidasi serta akuisisi sebagai upaya restrukturisasi perbankan bermasalah dapat disimpulkan bahwa program restrukturisasi tersebut secara efektif dapat menyelesaikan perbankan bermasalah serta meningkatkan kinerja suatu perusahaan perbankan. Selain itu dapat diketahui pula bahwa mekanisme restrukturisasi perbankan syariah bermasalah berpedoman PP No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, PP No.27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, serta UU Perbankan Syariah sebagai tata cara pelaksanaan program restrukturisasi perbankan syariah. Mekanisme tersebut apabila dilihat dari teori *az-zarī'ah* dapat dimasukkan ke dalam bentuk wasilah, yaitu sebagai perantara UU PPKSK dapat dijalankan sebagaimana tujuannya mengatasi perbankan bermasalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan regulasi tersebut sebagai pedoman restrukturisasi perbankan syariah bermasalah harus dilaksanakan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aufarul Mawahib, S.HI.
NIM : 1520310008
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Maret 2017

Saya yang menyatakan,



Muhammad Aufarul Mawahib, S.HI.

NIM: 1520310008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aufarul Mawahib, S.HI.
NIM : 1520310008
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Maret 2017

Saya yang menyatakan,



Muhammad Aufarul Mawahib, S.HI.

NIM: 1520310008



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1067/UIN.02/DS/PP.00.9/04/2017

Tugas akhir dengan judul : "Restrukturisasi Perbankan Syariah Bermasalah dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Perspektif *az-Zari'ah*".

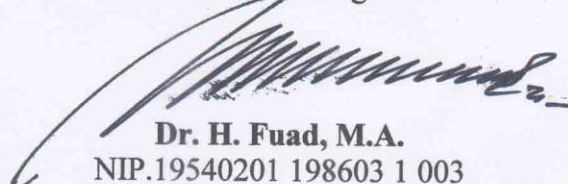
yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD AUFARUL MAWAHIB, S.HI.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310008
Telah diujikan pada : Rabu, 19 April 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

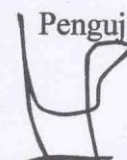

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP.19540201 198603 1 003

Penguji I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

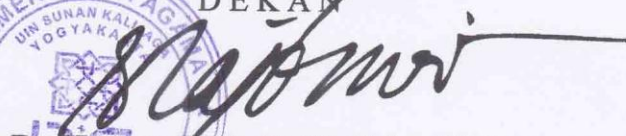


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 20 April 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Restrukturisasi Perbankan Syariah Bermasalah dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Perspektif *az-Zarī'ah*

Nama : Muhammad Aufarul Mawahib, S.HI

NIM : 1520310008

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua Sidang : Dr. H. Fuad, M.A.

Penguji I : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Penguji II : Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

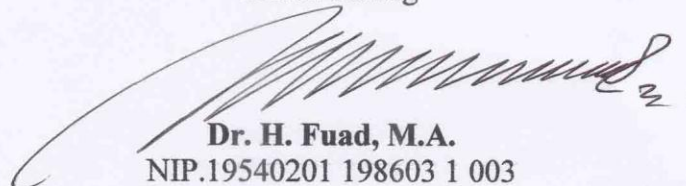
Diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 April 2017

Waktu : 12.15 s.d 13.15

Hasil/ Nilai : 3,75

Predikat : Sangat Memuaskan

Ketua Sidang


Dr. H. Fuad, M.A.
NIP.19540201 198603 1 003

Penguji I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING I

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**RESTRUKTURISASI PERBANKAN SYARIAH BERMASALAH
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN
PERSPEKTIF *AZ-ZARĪ'AH***

Yang ditulis oleh :

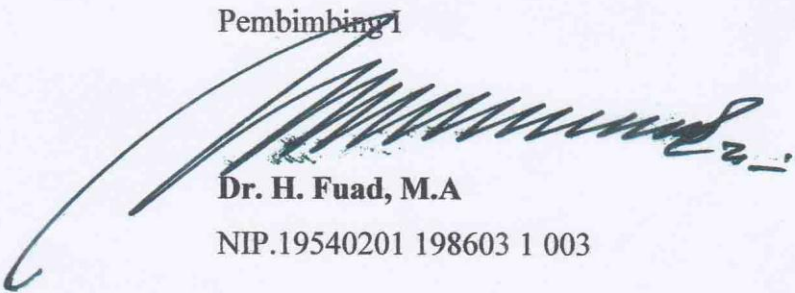
Nama : Muhammad Aufarul Mawahib, S.HI
NIM : 1520310008
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 29 Maret 2017

Pembimbing I



Dr. H. Fuad, M.A

NIP.19540201 198603 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING II

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**RESTRUKTURISASI PERBANKAN SYARIAH BERMASALAH
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN
PERSPEKTIF *AZ-ZARĪ'AH***

Yang ditulis oleh :

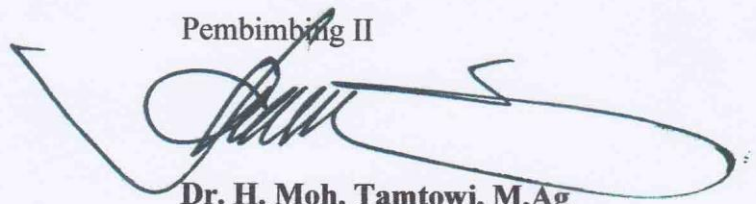
Nama : Muhammad Aufarul Mawahib, S.HI
NIM : 1520310008
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 30 Maret 2017

Pembimbing II



Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag

NIP. 19720903 199803 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta'qqidīn

عدة ditulis 'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis Hibah

جزية ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر ditulis zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

إ	kasrah	ditulis	i
أ	fathah	ditulis	a
أ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

UNTUK YANG TELAH TERUS DAN TANPA HENTI SELALU MEMBEKALIKU DENGAN TUMPAHAN KERINGAT, DOA DAN HARAPAN SERTA CINTA DAN KASIH SAYANG YANG PENUH IKHLAS DAN PENUH MAKNA, KU PERSEMBAHKAN KARYA INI SEBAGAI UNGKAPAN CINTA, KEPADA;

- + AYAHANDA H. NUR SALIM DAN IBUNDAKU TERSAYANG HJ. HASANAH YANG TIDAK PERNAH LELAH MENJAGA MEMBERIKAN KEIKHLASAN KASIH SAYANG DAN DOA.
- + UNTUK SEMANGAT HIDUPKU, SAUDARA-SAUDARAKU YANG SELALU MENYEMANGATIKU AGAR SELALU SEMANGAT, SENANTIASA SEHAT SELALU DAN SELALU MERINDUKANKU.
- + BANI NUR SALIM YANG SELALU MENGHARAPKAN AKU AGAR KELAK AKU MENJADI ORANG YANG BERGUNA BAGI KELUARGA.
- + PADA ALMAMATER TERCINTA PROGRAM MAGISTER HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله،
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولِي، أما بعد :

Dengan limpahan rahmat Allah SWT serta hidayah-Nya penulisan Tesis yang berjudul “*Restrukturisasi Perbankan Syariah Bermasalah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Perspektif az-Zarī’ah*” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amīn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
2. Bapak Dr. H. Fuad, M.A. selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya “*semrawut*” ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
3. Bapak Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca,

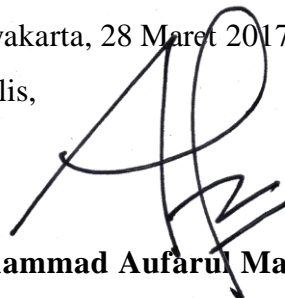
mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku penguji I, atas arahan serta perbaikan yang telah diberikan di dalam menyempurnakan tesis ini ke arah yang lebih baik, benar dan sistematis.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku penguji II, atas arahan serta perbaikan yang telah diberikan di dalam menyempurnakan tesis ini ke arah yang lebih baik, benar dan sistematis.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) Reguler angkatan tahun 2015 terima kasih atas inspirasinya serta teman-teman Program Magister Hukum Islam seperjuangan, terima kasih atas kekompakan dan semangat kita bersama.

Akhirnya, Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 28 Maret 2017

Penulis,



Muhammad Aufarul Mawahib, S.H.I

NIM: 1520310008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING I	vii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xx
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Pengolahan Data	18
6. Analisa Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II : TEORI <i>AẒ-ẒARĪ'AH</i>	22
A. Pengertian <i>aẒ-Ẓarī'ah</i>	22
B. Metode Menetapkan <i>aẒ-Ẓarī'ah</i>	24
C. Bentuk-Bentuk <i>aẒ-Ẓarī'ah</i>	25
1. <i>Sadd aẒ-Ẓarī'ah</i>	26
2. <i>Fath aẒ-Ẓarī'ah</i>	27
D. Prinsip-Prinsip <i>aẒ-Ẓarī'ah</i>	31
E. Macam-Macam <i>aẒ-Ẓarī'ah</i>	33
F. Kehujjahan <i>aẒ-Ẓarī'ah</i>	36
 BAB III : RESTRUKTURISASI PERBANKAN SYARIAH	
BERMASALAH.....	42
A. Gambaran Umum Restrukturisasi Perusahaan	42
1. Pengertian Restrukturisasi.....	42
2. Motif Restrukturisasi.....	43
3. Tujuan dan Karakteristik Restrukturisasi.....	44
a. Tujuan Restrukturisasi.....	44
b. Karakteristik Restrukturisasi	46
4. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi	46
a. Restrukturisasi Aset.....	47
b. Restrukturisasi Hutang	54
c. Restrukturisasi Kepemilikan	57
5. Dasar Hukum Restrukturisasi	61
B. Program Restrukturisasi Perbankan dalam UU No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	62
1. Tujuan Program Restrukturisasi.....	62
2. Lembaga Penjamin Simpanan Selaku Pelaksana Program Restrukturisasi.....	63
3. Perbankan Bermasalah	65
a. Faktor Internal	67

1) Kredit Macet	67
2) Transaksi Spekulatif	68
3) Melakukan Perbuatan Curang.....	68
4) Pengaruh Konflik Internal Bank.....	69
b. Faktor Eksternal	69
C. Mekanisme Restrukturisasi Aset	70
1. Merger	71
a. Proses merger berdasarkan PP No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas	71
b. Proses merger berdasarkan PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.....	74
2. Konsolidasi.....	76
a. Proses konsolidasi berdasarkan PP No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas	76
b. Proses konsolidasi berdasarkan PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.....	77
3. Akuisisi	79
a. Proses Akuisisi berdasarkan PP No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas	79
b. Proses Akuisisi berdasarkan PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.....	81

BAB IV : ANALISIS MEKANISME RESTRUKTURISASI PERBANKAN SYARIAH BERMASALAH PERSPEKTIF TEORI <i>AẒ-ẒARĪ'AH</i>.....	85
A. Merger Perspektif <i>aẒ-Ẓarī'ah</i>	86
B. Konsolidasi Perspektif <i>aẒ-Ẓarī'ah</i>	92
C. Akuisisi Perspektif <i>aẒ-Ẓarī'ah</i>	93

D. Mekanisme Restrukturisasi Perbankan Syariah Bermasalah.....	94
E. Efektifitas Program Restrukturisasi Perbankan	98
BAB V : PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN I TERJEMAHAN	I
B. LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS STABILITAS KEUANGAN	III
C. LAMPIRAN III SURAT BIMBINGAN	IV
D LAMPIRAN IV DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	VI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Bank Syariah di Seluruh Indonesia	1
Tabel 3.1 Perbedaan antara <i>Equity carve out</i> dan <i>Spin off</i>	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal itu tidak hanya disebabkan dari keadaan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, melainkan juga dikarenakan dukungan berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu pemerintah, regulasi perbankan, parlemen, dan sarjana-sarjana muslim.¹

Untuk bank syariah misalnya, sebagai badan usaha yang tunduk pada aturan-aturan syariah serta jadi lokomotif perkembangan ekonomi syariah di Indonesia jumlahnya sudah sedemikian banyak. Berdasarkan data statistik terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirilis Desember 2016 setelah diolah oleh penulis hasilnya sebagai berikut: ²

Tabel 1.1
Jumlah Bank Syariah di Seluruh Indonesia

	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Jumlah
KPO/KC	473	149	95	717
KCP/UPS	1.207	135	-	1342
KK	189	48	192	429
Keterangan: KPO/KC : Kantor Pusat/Kantor Cabang KCP/UPS :Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah KK : Kantor Kas				

¹ Rifki Islamil, *The Indonesian Islamic Banking Theory and Practices*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 1.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah 2016*, (ttp.:t.p.,2017), Volume 15 No 01, hlm. 5.

Berdasarkan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang selanjutnya akan disebut dengan UU Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³

Bank sebagai lembaga intermediasi memegang peranan sangat penting. Tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting yaitu memberikan jasa. Kesemua itu, menghimpun, menyalurkan, dan memberikan jasa dalam rangka memberikan keamanan, dan kepraktisan bagi masyarakat.⁴

Bank dalam melaksanakan fungsinya, juga berupaya memberikan *feedback* kepada nasabah berupa bagi hasil, hadiah, atau balas jasa lainnya agar menjadi nasabah di bank tersebut sebagai bentuk rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat menanamkan dananya.⁵ Namun untuk menjamin kepercayaan nasabah agar berminat menanamkan dananya di bank, perlu campur tangan peran pemerintah di dalamnya, terutama peraturan-peraturan yang menjamin kepercayaan nasabah.

Pemerintah dengan regulasi yang dikeluarkannya dalam kaitannya dengan masalah perekonomian merupakan unsur yang sangat penting di dalam mengatur serta mengendalikan jalannya roda perekonomian sekaligus penggerak perekonomian. Pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga

³ Pasal 3 UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

⁴ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 25.

kelangsungan hidup masyarakat, berperan bukan hanya sebagai pihak pengatur atau pengendali maupun pembuat kebijakan, melainkan sebagai mitra dan fasilitator serta dinamisator bagi dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat

Peran negara/pemerintah sebenarnya telah disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu;

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa,..”

Peran pemerintah dalam pembukaan UUD 1945 dapat diketahui bahwa negara berperan untuk melindungi kedaulatan bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, untuk memajukan taraf kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berkaitan dengan peran pemerintah dalam memajukan kesejahteraan bangsa, dapat dimulai dengan pembangunan sektor ekonomi. Proses pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan industri perbankan, karena bank merupakan wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta, maupun perseorangan selain untuk menyimpan dana juga untuk melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu, bank disebut sebagai *agent of development*.⁶ Peran pemerintah dalam industri perbankan selain menerbitkan peraturan-peraturan atau

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.15-16.

kebijakan tentang perbankan, juga menerbitkan sebuah aturan untuk menjamin rasa keamanan nasabah untuk menyimpan dananya di lembaga perbankan, yaitu dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan⁷, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang⁸.

Kehadiran kedua regulasi tersebut dan juga Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem perbankan secara keseluruhan, bukan hanya semata-mata menjaga individual nasabah, dalam artian untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan.⁹ Kedua undang-undang tersebut diundangkan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh.

UU PPKSK merupakan landasan hukum bagi lembaga berwenang yang disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Komite stabilitas sistem keuangan beranggotakan; Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.¹⁰ UU PPKSK ini juga menjadi landasan presiden untuk

⁷ Yang selanjutnya disebut dengan UU PPKSK.

⁸ Yang selanjutnya disebut dengan UU LPS.

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 291.

¹⁰ Pasal 4 (1)(2) UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis sitem Keuangan.

menyelenggarakan program restrukturisasi perbankan atas masukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.¹¹ Berdasarkan UU PPKSK dalam upaya penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Namun, jika upaya penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia untuk penanganan masalah likuiditas dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan masalah solvabilitas.¹²

Program restrukturisasi perbankan yang ditawarkan oleh UU PPKSK secara spesifik tidak menyebutkan bahwa program tersebut merupakan penanganan bagi bank syariah bermasalah¹³, namun secara tersirat dapat difahami bahwa program tersebut dapat diterapkan di bank syariah bermasalah, karena dalam UU PPKSK tersebut hanya menggunakan istilah bank sistemik dan bank selain bank sistemik, sedangkan bank sistemik sendiri merupakan bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut

¹¹ Pasal 38 UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis sitem Keuangan.

¹² Penjelasan UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis sitem Keuangan.

¹³ Bank syariah bermasalah adalah bank syariah yank gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat NPF (*non performing finance*).

mengalami gangguan atau gagal.¹⁴ Berdasarkan UU PPKSK tersebut menurut penulis dapat disimpulkan bahwa bank syariah juga dapat digolongkan kedalam bank sistemik maupun bank selain bank sistemik, karena perkembangan bank syariah saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang positif.

Kasus bank syariah bermasalah sebenarnya beberapa kali telah terjadi, di antaranya adalah banyaknya BPRS di daerah Bantul yang mengalami masalah ketika terjadi musibah gempa bumi tahun 2006, saat itu banyak nasabah program pembiayaan BPRS bersangkutan yang tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan adanya bencana alam, sehingga berakibat BPRS mengalami kerugian.¹⁵

Program restrukturisasi yang diatur dalam UU PPKSK merupakan program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.¹⁶ atau bisa dikatakan bahwa program restrukturisasi perbankan adalah sebuah program penyelamatan terhadap perbankan secara umum yang ditimbulkan oleh krisis sistem keuangan¹⁷. Hal tersebut dapat diartikan bahwa program restrukturisasi perbankan dapat pula diterapkan kepada perbankan syariah yang bermasalah. Program restrukturisasi perbankan dapat pula difahami sebagai upaya pemerintah untuk menghindari

¹⁴ Pasal 1 (5) UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis sitem Keuangan.

¹⁵ Dewi Maryam, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Gempa Bumi di BPR Syari’ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 2006”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁶ Pasal 1 (8) UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis sitem Keuangan.

¹⁷ Krisis Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan. Lihat Pasal 1 (3) Undang-undang No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

terjadinya krisis ekonomi seperti tahun 1998 dan 2008 yang disebabkan oleh banyaknya perbankan yang *collapse*, karena metode penanganannya dilakukan hanya secara instan, dalam artian hanya untuk mengatasi masalah jangka pendek. Permasalahan yang timbul ketika program restrukturisasi perbankan dalam UU PPKSK ini diterapkan dalam perbankan syariah bermasalah adalah apakah program tersebut dapat diterapkan secara optimal sebagai sarana menciptakan stabilitas sistem keuangan di perbankan syariah bermasalah ataukah hanya sekedar bisa diterapkan, namun tidak bisa menangani permasalahan perbankan syariah.

Kemudian, yang dimaksud program restrukturisasi perbankan dalam UU PPKSK yang diciptakan sebagai bentuk penanganan krisis sistem keuangan, merupakan program penanganan perbankan sebagai sebuah perusahaan berbadan hukum, bukan penanganan pembiayaan/kredit bermasalah. Namun program restrukturisasi perbankan tidak bisa dilepaskan dari pembiayaan/kredit bermasalah, karena pembiayaan/kredit bermasalah juga merupakan salah satu sebab timbulnya restrukturisasi perbankan. Perbankan syariah dalam UU Perbankan Syariah hanya dapat berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), sedangkan bank konvensional dapat berbadan hukum PT, koperasi maupun perusahaan daerah, bentuk tersebut diatur dalam UU Perbankan.¹⁸

Program restrukturisasi perbankan bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan kompetitif. Program tersebut berupa kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki solvabilitas dan profitabilitas bank,

¹⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 53.

mempertahankan kelangsungan hidup bank yang memiliki prospek bagus, dan mengaktifkan kembali fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. Untuk mewujudkan itu pemerintah memfokuskan kebijakan tersebut dengan empat kebijakan utama, yaitu;¹⁹

1. Program penyehatan perbankan
2. Perbaikan kondisi internal perusahaan
3. Penyempurnaan perangkat hukum perbankan
4. Peningkatan fungsi pengawasan Bank Indonesia.

Restrukturisasi perbankan meskipun erat kaitannya dengan restrukturisasi pembiayaan atau restrukturisasi kredit, namun keduanya memiliki perbedaan, karena restrukturisasi pembiayaan merupakan program yang diselenggarakan sebagai upaya penyelamatan nasabah agar mampu memenuhi prestasinya, dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).²⁰ Sedangkan restrukturisasi perbankan atau bisa disebut reorganisasi merupakan program penyelamatan suatu perusahaan perbankan yang dilakukan dengan cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kompensasi piutang, atau pemisahan.²¹ Hal tersebut juga sebagaimana dijelaskan oleh Bramantyo Djohanputro, bahwa restrukturisasi

¹⁹ Agus Budianto, *Merger Bank di Indonesia beserta Akibat-akibat Hukumnya*, (Jakarta: Ghalia, 2004), hlm. 61-62.

²⁰ Pasal 1 (7) PBI No.13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, lihat Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 447.

²¹ Penjelasan Pasal 43 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

terdapat tiga jenis, yaitu restrukturisasi aset/portofolio, restrukturisasi modal/keuangan dan restrukturisasi organisasi/manajemen.²²

Program restrukturisasi tidak hanya dilakukan ketika suatu perusahaan atau dalam penelitian ini perusahaan perbankan mengalami kegagalan atau masalah yang ditandai dengan keterlambatan membayar hutang sampai pengurangan jumlah karyawan. Namun program restrukturisasi juga bisa digunakan dengan alasan lain, misalnya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan para pemegang sahamnya.²³

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi dasar bagi penulis dalam menelaah/mengkaji pelaksanaan program restrukturisasi perbankan syariah bermasalah dalam UU No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang akan ditinjau dengan teori *a - ar 'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, di antaranya, yaitu:

1. Bagaimana restrukturisasi perbankan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan?
2. Bagaimana perspektif teori *a - ar 'ah* terhadap mekanisme program restrukturisasi perbankan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan?

²² Bramantyo Djohanputro, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai; Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2004), hlm. 33.

²³ Kamaludin, dkk, *Restrukturisasi, Merger dan Akuisisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 1.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan restrukturisasi perbankan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
2. Untuk menjelaskan mekanisme program restrukturisasi perbankan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan perspektif teori *a - ar 'ah*, apakah program restrukturisasi yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam dan apakah program tersebut secara efektif dapat menangani perbankan syariah bermasalah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran beberapa literatur yang telah penulis lakukan, penulis belum menemukan penelitian mengenai program restrukturisasi perbankan dalam UU PPKSK, tetapi dari penelitian-penelitian tersebut terdapat beberapa hal yang hampir serupa dengan penelitian yang sedang penulis kaji, sehingga dapat bahan pertimbangan penulis melakukan penelitian. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tentang program restrukturisasi;

Penelitian dengan judul, *Efektifitas Restrukturisasi Keuangan Perusahaan Dengan Debt to Equity Conversion di Lingkungan BUMN: Suatu Studi Kasus*, yang disusun oleh Saptariyanti AK Puteri dkk.²⁴ Penelitian ini fokus membahas salah satu jenis restrukturisasi yaitu *debt to equity conversion* yang dilakukan di lingkungan BUMN dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh restrukturisasi

²⁴ Saptariyanti AK Puteri dkk , “Efektifitas Restrukturisasi Keuangan Perusahaan Dengan Debt to Equity Conversion di Lingkungan BUMN: Suatu Studi Kasus”. *Finance and Banking Journal*, Vol. 15 No. 2 Desember 2013.

keuangan PT. ABC dengan menggunakan sistem *debt to equity conversion*. Kemudian dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh restrukturisasi keuangan menggunakan *debt to equity conversion*, namun restrukturisasi tersebut belum banyak membantu perusahaan untuk secara permanen mengatasi masalah yang ada. Kinerja keuangan perusahaan tetap memerlukan intervensi manajemen melalui strategi keuangan dan operasional yang tepat untuk mengatasi masalah keuangan perusahaan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis kerjakan yaitu terletak pada objek kajian penelitian. Penelitian ini objek kajiannya adalah program restrukturisasi di BUMN dengan menggunakan jenis restrukturisasi *debt to equity conversion*. Sedangkan penelitian yang sedang penulis kerjakan objek kajiannya adalah program restrukturisasi perbankan dalam UU PPKSK yang di tinjau dengan teori *a - ar 'ah*.

Berikutnya adalah penelitian Jese Yudistra Marpaung, yang berjudul, *Tinjauan Yuridis Terhadap Spin Off dalam Restrukturisasi Perseroan*.²⁵ Penelitian fokus membahas restrukturisasi perseoran dengan bentuk *spin off* yang ditinjau secara yuridis menggunakan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tujuan untuk menilai keefektifan *spin off* dalam restrukturisasi perseroan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa *spin off* perlu dilakukan di dalam restrukturisasi perseroan, karena ada beberapa alasan penting bagi perseroan untuk melakukan restrukturisasi antara lain karena persaingan, fleksibilitas dan biaya awal yang begitu tinggi. Kendati penelitian ini sama dengan

²⁵ Jese Yudistra Marpaung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Spin Off dalam Restrukturisasi Perseroan", Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2012.

penelitian yang penulis teliti mengenai keefektifan program restrukturisasi, namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu mengenai objek penelitian dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian ini objek penelitiannya yaitu restrukturisasi perseroan dengan bentuk *spin off* yang ditinjau dengan UU PT. sedangkan penelitian yang penulis teliti objek penelitiannya yaitu program restrukturisasi perbankan dalam UU PPKSK yang ditinjau dengan teori *a - ar 'ah*.

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Trisna Dewi, dengan judul, *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan*.²⁶ Penelitian ini fokus terhadap restrukturisasi kredit yang bertujuan mengkaji implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit perbankan serta hambatannya. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit perbankan belum optimal diterapkan terhadap semua debitur yang mengalami kesulitan membayar meskipun masih memiliki peluang untuk melaksanakan pembayaran. Penelitian ini pada dasarnya sama dengan penelitian yang penulis teliti yaitu menilai keefektifan suatu program restrukturisasi, namun yang membedakan adalah mengenai objeknya. Penelitian ini menggunakan restrukturisasi kredit, sedangkan penelitian yang penulis kerjakan menggunakan restrukturisasi aset.

²⁶ Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", Tesis, Universitas Udayana, 2015.

E. Kerangka Teoretik

Penerapan program restrukturisasi perbankan dalam UU PPKSK merupakan sebuah tindakan yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian Nasional.²⁷ Selain itu, UU PPKSK merupakan bentuk peran pemerintah terhadap masalah ekonomi dengan bentuk regulasi. Program restrukturisasi perbankan ini merupakan cara penanganan kasus perbankan bermasalah yang membahayakan perekonomian nasional apabila dikemudian hari usaha pencegahan yang diatur dalam UU PPKSK ini tidak bisa mencegahnya.

Program restrukturisasi perbankan bermasalah, apabila dilihat berdasarkan hukum Islam, maka dapat dikategorikan sebagai wasilah untuk menyehatkan kondisi bank yang bermasalah atau untuk menjadikan bank yang dikenai program restrukturisasi dapat meningkatkan operasionalnya. Berdasarkan hal tersebut program restrukturisasi perbankan sesuai dengan teori *a - ar 'ah*.

A - ar 'ah secara bahasa adalah wasilah atau jalan menuju sesuatu/perantara. Yaitu perantara kepada sesuatu yang dilarang atau kepada sesuatu yang dianjurkan.²⁸ Ketentuan hukum yang dikenakan pada *a - ar 'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Sehingga perbuatan yang membawa ke arah mubah adalah mubah,

²⁷ Pasal 1(8) UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Ekonomi.

²⁸ Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lihat Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.132. lihat juga, Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996),

perbuatan yang membawa ke arah haram adalah haram, dan perbuatan yang mengarahkan ke arah wajib adalah wajib.²⁹

A - ar 'ah memiliki dua bentuk, yaitu; adakalanya dilarang yang disebut *sadd a - ar 'ah* dan adakalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *fat a - ar 'ah*.³⁰ *Sadd a - ar 'ah* adalah menutup jalan bagi perbuatan yang pada hakikatnya boleh dilakukan, namun perbuatan tersebut digunakan sebagai wasilah untuk sesuatu yang menimbulkan mafsadah, sehingga hal tersebut dilarang.³¹

Sedangkan, *fat a - ar 'ah* secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *fat u* dan *a - ar 'ah*. Kata *fat u* merupakan bentuk *masdar* dari kata *فتح - يفتح* yang berarti membuka, sedangkan *a - ar 'ah* adalah sarana/wasilah dan sebab terjadinya sesuatu.³² Secara istilah *fat a - ar 'ah* adalah kebalikan dari *sadd a - ar 'ah*, yaitu menganjurkan media/jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan maslahat (manfaat/kebaikan), jika ia akan menghasilkan kebaikan. Penggunaan media yang akan melahirkan kemaslahatan harus didorong dan dianjurkan, karena menghasilkan kemaslahatan adalah sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. Sebagai contoh, dianjurkan untuk membangun industri tekstil, karena hal itu akan menghasilkan kebaikan, yaitu berguna membantu orang menutup auratnya.³³

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj, Saefullah Ma'shum. dkk, *Ushul Fiqh: Prof Muhammad Abu Zahrah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 439.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, hlm.139.

³¹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.173.

³² Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.132.

³³ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.236.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa program restrukturisasi perbankan cenderung serupa dengan *fat a - ar 'ah*, karena program restrukturisasi perbankan dilihat dari teori *a - ar 'ah* merupakan sarana untuk menjadikan sebuah bank yang pada asalnya *collapse* menjadi sehat atau grafik pertumbuhannya naik, sehingga perlu dilakukan agar tercapai hasil tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, maka tahapan yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang berfungsi sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research*. Yaitu penelitian yang seluruh datanya diperoleh melalui penggalian dan penelusuran buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan-catatan lainnya yang dinilai mempunyai hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah.³⁴ Sehingga penggalian dan penelusurannya menggunakan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan serta literatur yang berkaitan dengan objek kajian penulis yang berupa program restrukturisasi perbankan bermasalah yang ada dalam undang-undang tersebut.

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm. 28.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Maksud dari sistem norma adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁵ Tujuannya, memberikan argumentasi hukum terkait program restrukturisasi perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang ditinjau berdasarkan teori *a - ar 'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah bahan untuk mengawali sudut pandang dan kerangka berpikir penulis untuk melakukan analisis.³⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis atau undang-undang (*Statute Approach*). Yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis penelitian.³⁷ Penelitian ini menggunakan UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai dasar dalam mengawali sudut pandang kerangka berpikir penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan berupa *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dengan

³⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34.

³⁶ *Ibid.*, hlm.184.

³⁷ *Ibid.*, hlm.185.

mengumpulkan semua literatur yang dianggap sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya sumber-sumber tersebut dikaji dan ditelaah menjadi data sekunder.³⁸

Data sekunder adalah informasi yang di peroleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, namun tetap berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang atau putusan hakim.³⁹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan teori *a - ar 'ah*.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa karya tentang hukum yang dipublikasikan, tapi bukan berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan tentang Program Restrukturisasi Perbankan. Setelah semua data dapat dikumpulkan, maka akan disaring kemudian dibaca ulang dan dideskripsikan serta dianalisis dengan lebih tajam.

³⁸ Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm 163.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 181.

⁴⁰ *Ibid*.

5. Pengolahan Data

Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data:⁴¹

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Proses pemeriksaan data dilakukan dengan memeriksa bahan hukum yang telah disusun oleh penulis, terutama bahan hukum sekunder sehingga dapat mengurangi kesalahan dan sesuai dengan sistematika penulisan.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi yaitu proses menyeleksi dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis ke dalam sub-sub bab yang akan diteliti oleh penulis, yaitu mengenai teori *a - ar 'ah*, restrukturisasi yang meliputi pengertian, motif, tujuan, bentuk, dan dasar hukum restrukturisasi.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi yaitu hampir sama dengan kualifikasi, namun dalam verifikasi proses seleksinya digunakan untuk menyeleksi data mana yang sesuai dengan tema penelitian atau tidak. Sehingga penelitian yang penulis teliti, menjadi fokus dan mudah difahami, dengan mengurangi pembahasan-pembahasan yang tidak tidak sesuai.

d. Analisis (*analyzing*)

Setelah data terkumpul dan telah disusun sebagaimana sistematika penulisan, kemudian proses selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut sehingga dapat memecahkan masalah yang disebutkan dalam rumusan masalah. Yaitu dapat

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2013), hlm. 29.

menjelaskan bagaimana restrukturisasi perbankan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Serta dapat menjelaskan bagaimana mekanisme program restrukturisasi perbankan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan perspektif teori *a - ar 'ah*, apakah program restrukturisasi yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam dan apakah program tersebut secara efektif dapat menangani perbankan syariah bermasalah.

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Setelah semua data tersaji dan telah dianalisis berdasarkan perspektif yang digunakan, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dari semua data yang telah disajikan ke dalam suatu kesimpulan yang ringkas namun bermakna.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Deskriptif yaitu memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek penelitian. Sedangkan preskriptif adalah memberikan argument atas hasil penelitian atau melakukan justifikasi hasil penelitian.⁴² Penelitian ini, berusaha menggambarkan secara utuh dan komprehensif mengenai program restrukturisasi perbankan syariah bermasalah yang ada dalam UU No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, kemudian akan penulis tinjau menggunakan teori *a - ar 'ah* berkaitan dengan mekanisme program restrukturisasi perbankan dalam UU PPKSK, sehingga dapat diketahui apakah program restrukturisasi perbankan dalam UU PPKSK sesuai dengan teori *a -*

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian...*, hlm.183-184.

ar 'ah sehingga boleh dilaksanakan atau tidak dan juga apakah program restrukturisasi perbankan dalam UU PPKSK dapat diterapkan untuk mengatasi perbankan syariah bermasalah secara efektif.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersaji dalam lima bab yang masing-masing bab memaparkan kerangka isi dan alur logis mengenai penelitian ini dengan disertai argumentasi tata urutan atau tahapan-tahapan penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

Bab Pertama. Merupakan bab pendahuluan atau bab pengantar dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Yaitu bab yang berisi kajian teori yang digunakan menjadi sebuah pisau analisis dalam penelitian ini. Bab ini membahas tentang pengertian *a - ar 'ah*, metode menetapkan *a - ar 'ah*, bentuk-bentuk *a - ar 'ah*, prinsip-prinsip *a - ar 'ah*, macam-macam *a - ar 'ah*, dan kehujjahan *a - ar 'ah* yang didapatkan dari berbagai literatur.

Berikutnya adalah bab ketiga. Yaitu berupa data yang didapatkan oleh penulis ketika melakukan studi pustaka, bab ini membahas tentang gambaran umum restrukturisasi perusahaan, program restrukturisasi perbankan yang didapatkan dari UU PPKSK, meliputi; tujuan restrukturisasi perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan selaku pelaksana program restrukturisasi, dan perbankan

bermasalah, selain itu, dalam bab ini juga membahas mengenai proses atau tata cara pelaksanaan restrukturisasi aset.

Selanjutnya bab keempat. Yaitu pokok pembahasan dalam penelitian ini yang berisi analisis proses restrukturisasi perbankan syariah bermasalah perspektif teori *a - ar 'ah*. Bab ini membahas mengenai merger perspektif *a - ar 'ah*, konsolidasi perspektif *a - ar 'ah*, akuisisi perspektif *a - ar 'ah*, mekanisme restrukturisasi perbankan syariah bermasalah, serta efektifitas program restrukturisasi perbankan.

Terakhir adalah bab kelima. Yaitu bagian penutup dalam penelitian ini. Bab terakhir ini membahas mengenai dua ide pokok, yaitu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis yang berupa jawaban dari pokok permasalahan. Selain itu, dalam bab kelima terdapat saran-saran yang dapat diterapkan setelah adanya penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Restrukturisasi perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan merupakan suatu program penanganan permasalahan perbankan yang dapat membahayakan perekonomian nasional, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan wewenang-wewenang khusus. Program restrukturisasi perbankan berjalan dan berakhir berdasarkan instruksi dari presiden RI atas rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Kendati tidak dijelaskan secara rinci tentang bentuk restrukturisasi apa yang digunakan dalam program restrukturisasi perbankan syariah bermasalah. Namun dari data yang telah penulis paparkan, maka restrukturisasi yang sesuai dengan tujuan UU PPKSK adalah restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh dengan bentuk restrukturisasi aset. Pemilihan bentuk restrukturisasi perusahaan didasari karena lembaga perbankan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional merupakan sebuah perusahaan dan rata-rata berbadan hukum perseroan terbatas.

Berdasarkan dari wewenang yang diberikan kepada LPS dalam UU PPKSK, dapat diketahui bahwa penyebab dari bank yang bermasalah adalah masalah permodalan atau keuangan. Namun untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dalam lingkup lembaga perbankan tidak dapat diterapkan restrukturisasi sektoral yaitu berkaitan hanya dengan sektor keuangan, tapi harus menerapkan

program restrukturisasi secara menyeluruh dengan menggunakan restrukturisasi aset yang didalamnya masalah keuangan, organisasi, dan aset sebuah perusahaan perbankan dapat di atasi dengan optimal dan efisien.

Kemudian, mengenai mekanisme program restrukturisasi perbankan syariah dalam UU PPKSK sebagai upaya restrukturisasi perbankan syariah bermasalah, menurut penulis dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada PP No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, serta PP No.27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Penggunaan regulasi tersebut sebagai *lex specialis* dari UU PPKSK, karena bank syariah merupakan sebuah perusahaan perbankan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). selain itu. hal tersebut juga sesuai dengan pasal 18 serta pasal 61 Peraturan Bank Indonesia 11/3/PBI/2009 tentang Bank Syariah yang menyatakan untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan. Namun selain menggunakan kedua regulasi tersebut, restrukturisasi dalam bank syariah juga menggunakan pedoman UU Perbankan Syariah untuk menjaga kesyariatannya.

Berdasarkan pemaparan mengenai mekanisme restrukturisasi perbankan syariah bermasalah di atas, apabila ditinjau berdasarkan teori *az-zarī'ah*, maka mekanisme restrukturisasi perbankan syariah bermasalah yang menggunakan pedoman PP No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, PP No.29 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, serta UU Perbankan Syariah sebagai tata cara pelaksanaan program restrukturisasi perbankan syariah dapat dimasukkan ke dalam bentuk *wasilah*, yaitu sebagai perantara UU PPKSK dapat dijalankan sebagaimana

tujuannya mengatasi perbankan bermasalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan regulasi tersebut sebagai pedoman restrukturisasi perbankan syariah bermasalah harus dilaksanakan.

Berdasarkan contoh-contoh restrukturisasi aset dengan cara merger, konsolidasi serta akuisisi sebagai upaya restrukturisasi perbankan bermasalah dapat disimpulkan bahwa program restrukturisasi tersebut secara efektif dapat menyelesaikan perbankan bermasalah serta meningkatkan kinerja suatu perusahaan perbankan. Sehingga apabila program restrukturisasi perbankan ini diterapkan untuk mengatasi perbankan syariah bermasalah keefektifannya akan sama.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap program restrukturisasi perbankan syariah bermasalah dalam UU PPKSK, maka dari hasil penelitian ini penulis dapat memberikan beberapa saran terkait masalah yang penulis angkat, di antaranya;

1. Untuk Akademisi

Hendaknya memasukkan program restrukturisasi perbankan syariah menjadi salah satu mata kuliah untuk jurusan Hukum Bisnis Syariah atau yang setara.

2. Untuk Pemerintah

Agar segera menerbitkan peraturan terkait mengenai tata cara pelaksanaan program restrukturisasi perbankan syariah bermasalah.

3. Untuk Bank Syariah
 - a. Lebih berhati-hati dalam mengelola dan menyalurkan dana nasabah sehingga tidak terjadi permasalahan bank
 - b. Menaati peraturan-peraturan yang ada
 - c. Segera mengatasi permasalahan yang dikhawatirkan dapat menjadi penyebab krisis yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

B. Hadis

al-Bukh r , Abu Abdillah Mu ammad bin Ism ' l bin Ibr h m bin al-Mug rah, *a i al-Bukhari*, "Kitab al-Adab", Beirut: D r Ibnu Katsir, 1987.

an-Nais b r , Ab usain Muslim bin ajjaj al-Qusyair , *a i Muslim*, "Kit b al-Masaqah wal Muzara'ah", Riya : D r ayyibah Linnasyri wa Tawzi'i, 2006.

C. Fikih/Ushul Fikih

Anshori, Abdul Ghofur, dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur, "*Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*". Yogyakarta: UII Press, 2010.

Ab Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj, Saefullah Ma'shum. dkk, *Ushul Fiqh: Prof Muhammad Abu Zahrah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli, A, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.

_____, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos, 1996.

Hasan, Husain Hamid, *Na ariyyah al-Masla ah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: D r an-Nah ah al-'Arabiyyah, 1971.

Islamil, Rifki, *The Indonesian Islamic Banking Theory and Practices*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *A'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-'alam n*, Beirut: Dar al-Jail, 1978.

Racheedus, "Sadd az-Dzari'ah dan Fat adz-Dzari'ah", dalam <https://racheedus.wordpress.com/>, diakses tanggal 2 Januari 2017.

S. Praja, Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Prenada media Group, 2009.

Z, A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012.

az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

D. Hukum

Budianto, Agus, *Merger Bank di Indonesia beserta Akibat-akibat Hukumnya*, Jakarta: Ghalia, 2004.

Dewi, Putu Eka Trisna, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", Tesis, Universitas Udayana, 2015.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady, Munir, *Hukum Tentang Merger: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Hariyani, Iswi, dkk, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan & memajukan Perusahaan*, Jakarta: Visimedia, 2011.

Marpaung, Jese Yudistra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Spin Off dalam Restrukturisasi Perseroan", Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2012.

Maryam, Dewi, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Gempa Bumi di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 2006", Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syaria'ah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik

F. Lain-lain

Admin CIMB Niaga, “Sejarah Bank CIMB Niaga” dalam website <https://www.cimbniaga.com/in/about-us/index.html>, diakses tanggal 12 Februari 2017.

Admin Mandiri, “Transformasi Bank Mandiri”, dalam website, http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about_profile.asp diakses tanggal 31 Januari 2017.

Coyle, Brian, *Mergers and Acquisitions*, tt: Glenlake Publishing Company, 2000.

Detik Finance, “Merger Bank Niaga dan Lippo Efektif 1 Oktober” dalam website <http://finance.detik.com/moneter/949462/>, diakses tanggal 10 Februari 2017.

Djohanputro, Bramantyo, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai; Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*, Jakarta: Penerbit PPM, 2004.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 1996.

Kamaludin, dkk, *Restrukturisasi, Merger dan Akuisisi*, Bandung: Mandar Maju, 2015.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Moin, Abdul, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi Edisi Kedua*, Yogyakarta: Ekonisia, 2010.

Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah 2016*, ttp.:t.p.,2017, Volume 15 No 01.

Puteri, Saptariyanti AK, dkk , “Efektifitas Restrukturisasi Keuangan Perusahaan Dengan *Debt to Equity Conversion* di Lingkungan BUMN: Suatu Studi Kasus”. *Finance and Banking Journal*, Vol. 15 No. 2 Desember 2013.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta; Intermedia, 1993.

Sutojo, Siswanto, *Analisa Kredit Bank Umum*, Jakarta; Pustaka Binaman Pressindo, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: UIN Press, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I TERJEMAHAN

NO.	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	26	53	Suatu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)
2.	29	61	Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib
3.	29	62	Apa yang membawa kepada yang haram, maka hal tersebut juga haram hukumnya
4.	36	73	Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
5.	36	74	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, " beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama."
6.	38	80	Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan

			memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan
7.	39	83	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): " <i>Rā'ina</i> ", tetapi Katakanlah: " <i>Unzhurna</i> ", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih
8.	39	85	Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman (yaitu Ibnu Bilal) dari Yahya (dan dia Ibnu Sa'id) yang mengatakan, Sa'id bin Musayyib menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa menimbun barang maka dia berdosa". Lalu Sa'id ditanya, "Kenapa engkau lakukan <i>ihthikar</i> ?" Sa'id menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan <i>ihthikar</i>
9.	40	87	Menolak kerusakan (<i>mafsadah</i>) didahulukan daripada meraih kemaslahatan

**LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG NO.9 TAHUN 2016 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM
KEUANGAN**



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, diperlukan stabilitas sistem keuangan yang kokoh;
- b. bahwa untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.
2. Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
3. Krisis Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.
4. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
5. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
6. Surat Berharga Negara adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara.

7. Bank . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
8. Program Restrukturisasi Perbankan adalah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
9. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
11. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. keterpaduan;
- e. efektivitas;
- f. efisiensi; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3 . . .



- 4 -

Pasal 3

- (1) Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi:
 - a. koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
 - b. penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
 - c. penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.
- (2) Koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup bidang:
 - a. fiskal;
 - b. moneter;
 - c. makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan;
 - d. pasar keuangan;
 - e. infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan; dan
 - f. resolusi Bank.
- (3) Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup penanganan seluruh bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penanganan permasalahan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Sistemik.

BAB II KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Komite . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.
- (3) Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara;
 - b. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara;
 - c. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan
 - d. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.
- (4) Setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 5

Komite Stabilitas Sistem Keuangan bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
- c. melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.

Pasal 6

Komite Stabilitas Sistem Keuangan berwenang:

- a. menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. membentuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan;
- d. melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya;
- e. menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- f. merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan atau dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal;
- g. merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- h. menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- i. menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- j. menetapkan keputusan pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank; dan
- k. merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Ketiga
Kesekretariatan

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dibantu oleh sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dipimpin oleh sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Anggaran sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (4) Organisasi dan tata kerja sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rapat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 8

- (1) Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (2) Rapat secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Rapat sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 9

- (1) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan harus dihadiri oleh seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

(2) Rapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dipimpin oleh koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (3) Dalam hal anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan berhalangan hadir secara fisik pada waktu dan tempat rapat yang telah ditentukan, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat diselenggarakan melalui sarana komunikasi elektronik yang memungkinkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (4) Dalam hal koordinator dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan berhalangan tetap, koordinator dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bersangkutan diwakili oleh pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tidak dihadiri oleh seluruh anggota, baik secara fisik maupun melalui sarana komunikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau oleh pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dijadwalkan kembali.
- (6) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan rapat sewaktu-waktu berdasarkan permintaan anggota, penjadwalan kembali dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) Rapat hasil penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diselenggarakan dengan kehadiran paling sedikit 2 (dua) anggota dengan hak suara dan dapat mengambil keputusan.
- (8) Pelaksanaan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan harus didokumentasikan secara utuh mulai dari awal sampai dengan berakhirnya rapat.

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dilakukan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

(2) Pengambilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan berhak menyampaikan pendapat dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, tetapi tidak berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.

Pasal 11

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, usulan keputusan yang diajukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dinyatakan ditolak dan pendapat akhir setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan didokumentasikan.
- (3) Usulan keputusan yang dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Setiap keputusan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (6) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang tidak hadir dalam rapat, dianggap menyetujui keputusan rapat tanpa harus menandatangani keputusan rapat.

Bagian . . .



- 10 -

Bagian Kelima
Pertukaran Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan pertukaran data dan informasi antaranggota yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- (2) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kode Etik

Pasal 13

Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan menegakkan kode etik Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Bagian Ketujuh
Akuntabilitas dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Komite Stabilitas Sistem Keuangan memublikasikan dan memberikan akses informasi kepada publik mengenai keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan memublikasikan pelaksanaan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini.
- (3) Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan:
 - a. jenis informasi yang bersifat rahasia;
 - b. jenis informasi yang tidak bersifat rahasia; dan
 - c. tata cara akses informasi oleh publik,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Dalam hal informasi ditetapkan sebagai jenis informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap orang yang mengetahui informasi tersebut, baik karena kedudukan, profesi, maupun hubungan apa pun dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi dimaksud kepada pihak lain, kecuali untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

Pasal 15

Komite Stabilitas Sistem Keuangan melaporkan kepada Presiden mengenai:

- a. kondisi Stabilitas Sistem Keuangan setiap 3 (tiga) bulan;
- b. penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- c. penanganan permasalahan Bank Sistemik; dan/atau
- d. pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III PENCEGAHAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang setiap anggota untuk mencegah terjadinya Krisis Sistem Keuangan.
- (2) Pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan sesuai dengan protokol manajemen krisis setiap anggota.

(3) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan hasil pemantauan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (4) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merumuskan rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Bagian Kedua Bank Sistemik

Pasal 17

- (1) Untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan di bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan Bank Sistemik.
- (2) Penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dilakukan pada kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia melakukan pemutakhiran daftar Bank Sistemik secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penetapan dan pemutakhiran daftar Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 18

- (1) Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib:
 - a. memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas; dan
 - b. menyusun rencana aksi untuk disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal Bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal Bank.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tambahan kapasitas permodalan bagi Bank Sistemik yang digunakan untuk menyerap kerugian pada saat Bank mengalami permasalahan keuangan.
- (4) Ketentuan mengenai rasio kecukupan modal, rasio kecukupan likuiditas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tambahan kapasitas permodalan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengalami kesulitan keuangan, Bank Sistemik menerapkan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Sistemik menerapkan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memastikan dilaksanakannya rencana aksi atau langkah penyehatan oleh Bank dengan menerbitkan perintah tertulis, menempatkan pengelola statuter, dan/atau melalui mekanisme lain berdasarkan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan mengenai rencana aksi dan langkah penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bagian Ketiga
Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank Sistemik

Pasal 20

- (1) Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik; dan
 - b. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank Sistemik untuk mengembalikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah harus dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi berupa surat berharga yang memiliki peringkat tinggi dan mudah dicairkan.
- (4) Dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki agunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jumlah yang cukup, Bank Sistemik dapat menggunakan aset kredit dengan kolektibilitas lancar sebagai agunan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memutuskan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

(6) Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (6) Pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan Undang-Undang ini dan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Sistemik yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memastikan penggunaannya dan pelaksanaan rencana pembayarannya kembali sesuai dengan perjanjian.

Bagian Keempat Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan wewenangnya melakukan penanganan permasalahan solvabilitas, termasuk memastikan pelaksanaan rencana aksi Bank Sistemik.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan persiapan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kondisinya memburuk dan ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, Otoritas Jasa Keuangan meminta Lembaga Penjamin Simpanan meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik.
- (4) Dalam meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan:
 - a. meminta pengurus Bank untuk menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank Sistemik secara material;
 - b. meminta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. meminta pengurus Bank untuk mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban Bank Sistemik; dan/atau
 - c. memfasilitasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pemasaran atas aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dan memfasilitasi calon Bank penerima untuk melakukan uji tuntas dalam hal akan dilakukan pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik.
- (5) Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dapat mengatasi permasalahan solvabilitas Bank Sistemik, Otoritas Jasa Keuangan meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan disertai dengan rekomendasi langkah penanganan permasalahan Bank Sistemik.
- (6) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik.
- (7) Langkah penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan:
- a. memutuskan penyerahan Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk dilakukan penanganan berdasarkan Undang-Undang ini dan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - b. menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang masing-masing untuk mendukung pelaksanaan penanganan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (8) Ketentuan mengenai penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 22

- (1) Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dengan cara:
 - a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima;
 - b. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara; atau
 - c. melakukan penanganan Bank sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Ketentuan mengenai pemilihan cara penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan tata cara penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 23

Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a atau kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:

- a. menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan;
- b. mengalihkan kewajiban Bank Sistemik sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bank penerima atau Bank Perantara yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain;
- c. melakukan pembayaran kepada Bank penerima atau Bank Perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan; dan
- d. melakukan wewenang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 24

- (1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank penerima dan/atau Bank Perantara, terjadi demi hukum sejak akta pengalihan ditandatangani.
- (2) Pengalihan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perizinan untuk melakukan kegiatan tertentu yang dimiliki Bank Sistemik kepada Bank Perantara.
- (3) Pengalihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diikuti dengan proses penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah dilakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima dan/atau Bank Perantara, Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Bank yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya.
- (5) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses likuidasi terhadap Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 25

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan mendirikan Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dan menjalankan aktivitas usaha Bank.
- (2) Dalam pendirian Bank Perantara oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

(3) Otoritas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
 - b. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat kegiatan usaha sebagai Bank;
 - b. modal disetor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; dan
 - c. struktur organisasi dan sumber daya manusia, pedoman manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, prosedur kerja, rencana bisnis, proyeksi neraca dan laba rugi, serta laporan arus kas bulanan.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. kewajiban penyediaan modal minimum bank umum;
 - b. susunan direksi dan dewan komisaris; dan
 - c. rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Bank Perantara.
- (6) Uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Bank Perantara dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan uji kemampuan dan kepatutan yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Bank Perantara.
- (7) Bank Perantara dalam menjalankan kegiatan usaha harus:
 - a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan berkala dan dokumen lain yang diwajibkan bagi bank umum; dan
 - b. memenuhi persyaratan terkait prinsip kehati-hatian dan indikator tingkat kesehatan bank umum.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 26

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan harus segera menjual Bank Perantara atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain.
- (2) Penjualan Bank Perantara kepada pihak lain atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.

Pasal 27

- (1) Dana untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bersumber dari kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan:
 - a. menjual Surat Berharga Negara yang dimilikinya melalui pasar, kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. memperoleh pinjaman dari pihak lain.
- (3) Penjualan Surat Berharga Negara oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (4) Berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara.

Pasal 28

- (1) Selisih kurang antara dana hasil penjualan Bank Perantara ditambah hasil likuidasi Bank Sistemik yang telah ditangani permasalahannya dan dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan permasalahan Bank Sistemik, merupakan biaya penanganan permasalahan Bank Sistemik bagi Lembaga Penjamin Simpanan dan bukan merupakan kerugian keuangan negara.

(2) Selisih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Selisih lebih antara dana hasil penjualan Bank Perantara ditambah hasil likuidasi Bank Sistemik yang telah ditangani permasalahannya dan dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan permasalahan Bank Sistemik, merupakan penambah kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 29

Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan laporan mengenai perkembangan penanganan Bank Sistemik kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kelima

Penanganan Permasalahan Bank selain Bank Sistemik

Pasal 30

Ketentuan mengenai pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 31

- (1) Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank selain Bank Sistemik yang diserahkan Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB IV PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan jika protokol manajemen krisis yang dimilikinya mengindikasikan adanya permasalahan pada bidang yang menjadi tanggung jawab setiap anggota yang dapat memengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Permintaan penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil penilaian protokol manajemen krisis anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bersangkutan yang mengindikasikan adanya permasalahan pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan memberikan informasi mengenai hasil penilaian protokol manajemen krisis yang memengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Penilaian mengenai status Stabilitas Sistem Keuangan didasarkan pada data, informasi, kerangka penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan, dan pertimbangan dari seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk pertimbangan profesional setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (5) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyepakati status Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi:
 - a. normal; atau
 - b. Krisis Sistem Keuangan.

(6) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (6) Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi normal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penanganan permasalahan Sistem Keuangan dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- (7) Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan.
- (8) Penyampaian rekomendasi kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan langkah penanganan kondisi Krisis Sistem Keuangan yang mencakup bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (9) Presiden memutuskan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam status Stabilitas Sistem Keuangan menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan sesuai dengan rekomendasi atau menolak rekomendasi status Stabilitas Sistem Keuangan yang disampaikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 33

Dalam hal Presiden menolak rekomendasi status Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9), penanganan permasalahan Sistem Keuangan dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Pasal 34

Dalam hal Presiden memutuskan Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9), Presiden dapat menerima sebagian atau seluruh rekomendasi langkah penanganan yang disampaikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8).

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 35

Selain langkah penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan besaran nilai simpanan nasabah penyimpan pada Bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai terjadi perubahan Stabilitas Sistem Keuangan dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal, Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Presiden memutuskan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam status Stabilitas Sistem Keuangan menjadi kondisi normal sesuai dengan rekomendasi atau menolak rekomendasi perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan menjadi kondisi normal yang disampaikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Bagian Kedua Penanganan Permasalahan Bank

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 29 berlaku juga untuk penanganan permasalahan Bank Sistemik dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, serta ketentuan mengenai penjualan Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk penanganan permasalahan Bank selain Bank Sistemik dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Bagian Ketiga
Restrukturisasi Perbankan dalam Krisis Sistem Keuangan

Pasal 38

- (1) Dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan dan terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Komite Stabilitas Sistem Keuangan merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.
- (2) Rekomendasi penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8).
- (3) Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 39

- (1) Dana penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan berasal dari:
 - a. pemegang saham Bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu menjadi modal;
 - b. hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban Bank yang ditangani;
 - c. kontribusi industri perbankan; dan/atau
 - d. pinjaman yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pihak lain.
- (2) Kontribusi industri perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dari premi penjaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Penetapan kontribusi industri perbankan sebagai bagian dari premi penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Program Restrukturisasi Perbankan diselenggarakan.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (4) Ketentuan mengenai besaran bagian premi untuk pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan memisahkan pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dari aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
 - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham Bank;
 - b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan dewan komisaris Bank atau organ lain yang setara;
 - c. menangguhkan pembayaran kewajiban tertentu dari Bank;
 - d. menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan Bank di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
 - e. menjual . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- e. menjual, melelang atau mengalihkan tagihan Bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
- f. mengalihkan pengelolaan seluruh atau sebagian kekayaan, kegiatan, dan/atau manajemen Bank kepada pihak lain;
- g. melakukan penyertaan modal sementara pada Bank secara langsung atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham Bank;
- h. melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal;
- i. menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;
- j. melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
- k. meneliti dan memeriksa untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank;
- l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank dan membebankan kerugian tersebut kepada modal Bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi, anggota dewan komisaris atau organ yang setara, dan/atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
- m. mewajibkan pemegang saham Bank untuk menambah modal sesuai dengan jumlah tambahan modal yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- n. membekukan aset milik pengurus Bank, pemegang saham Bank, dan/atau pihak terafiliasinya yang terindikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
- o. mengalihkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- o. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank penerima atau Bank Perantara;
 - p. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - q. menjamin pinjaman tertentu dari Bank;
 - r. memberi pinjaman kepada Bank; dan
 - s. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan seluruh wewenang terkait dengan penanganan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank penerima atau Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi pelaksanaan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf o.

Pasal 43

Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan dukungan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan.

Pasal 44

Lembaga Penjamin Simpanan melaporkan pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan kepada Presiden melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 45

- (1) Dalam hal Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional telah teratasi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan.
- (2) Presiden memutuskan untuk mengakhiri Program Restrukturisasi Perbankan sesuai dengan rekomendasi atau menolak rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengakhiri Program Restrukturisasi Perbankan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Presiden memutuskan untuk mengakhiri Program Restrukturisasi Perbankan, aset dan kewajiban yang masih tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan tetap menjadi aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Pencatatan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Dalam hal terdapat selisih lebih antara aset dan kewajiban yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan, selisih lebih tersebut menambah kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan yang berasal dari kontribusi industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c.
- (4) Dalam hal terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan, selisih kurang tersebut tidak diperhitungkan dalam modal Lembaga Penjamin Simpanan dan ditutup dengan kontribusi industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan.

(5) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (5) Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset.
- (6) Penghapusbukuan dan penghapustagihan aset yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dari ketentuan penghapusan aset negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Dalam hal anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan maka yang bersangkutan mendapat bantuan hukum dari lembaga yang diwakilinya atau yang menugaskannya.

Pasal 49

Keputusan yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan/atau pelaksanaan dari keputusan tersebut oleh setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Undang-Undang ini adalah sah dan mengikat setiap pihak.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) dinyatakan tetap sah dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Pasal 51

Tugas dan wewenang sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk pengelolaan dokumen, dilaksanakan oleh sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan sampai dengan terbentuknya sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 52 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 52

Penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- b. Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); dan
- c. Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Komite Koordinasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963) beralih menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (3) Fungsi, tugas, dan wewenang Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 55

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Asisten Deputi Bidang Hukum dan
Asisten Deputi Bidang Undang-undangan,



Yasonna Djaman

LAMPIRAN III KARTU BIMBINGAN TESIS



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Aufarul Mawahib
NIM : 1520310008
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)
Prodi : Magister Hukum Islam (HI)
Pembimbing I : Dr. H. Fuad, M.A.
Tesis Berjudul : Restrukturisasi Perbankan Syariah Bermasalah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Perspektif *az-Zari'ah*.

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	4 / 1 / 17	I	Bab I	
2.	12 / 1 / 17	II	Revisi Bab I	
3.	20 / 2 / 17	III	Bab II - V	
4.	3 / 3 / 17	IV	Transliterasi Tesis	
5.	23 / 3 / 17	V	Penulisan Tesis	
6.	29 / 3 / 17	VI	Acc Tesis	

Yogyakarta, 29 / Maret / 2017
Mengetahui,
Pembimbing I

(Dr. H. Fuad, M.A.)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Aufarul Mawahib
NIM : 1520310008
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)
Prodi : Magister Hukum Islam (HI)
Pembimbing II : Dr.H. Moh. Tamtowi, M.Ag.
Tesis Berjudul : Restrukturisasi Perbankan Syariah Bermasalah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Perspektif *az-Zari'ah*.

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	03/2/17	I	BAB I - I	
2	15/2/17	II	REVISI BAB II	
3	21/2/17	III	REVISI BAB III	
4	03/3/17	IV	REVISI BAB IV	
5	24/3/17	V	REVISI BAB V	
6	30/3/17	VI	REVISI SUBSTANSI	

Yogyakarta, 30/ Maret/ 2017
Mengetahui,
Pembimbing II

(Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag.)

LAMPIRAN IV DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	Muhammad Aufarul Mawahib
Tempat/Tgl Lahir	:	Lamongan, 21 Maret 1992
Nama Ayah	:	H. Nur Salim
Nama Ibu	:	Hj. Hasanah
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Tinggi/berat	:	168/82
Status	:	Belum Menikah
Alamat	:	Jl. Kalbakal RT/RW 007/002 Dengok, Paciran, Lamongan
Nomer Ponsel	:	085648547831
Email	:	aufarulmawahib28@gmail.com



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- | | |
|--|---------------------|
| a. MI Maslakul Huda Dengok, Paciran, Lamongan | Tahun 1998-2004 |
| b. MTs Maslakul Huda Dengok, Paciran, Lamongan | Tahun 2004-2007 |
| c. MA Maslakul Huda Dengok, Paciran, Lamongan | Tahun 2007-2010 |
| d. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Tahun 2011-2015 |
| e. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Tahun 2015-Sekarang |

2. Pendidikan Non Formal

- | | |
|---|------------|
| a. Primagama Brondong, Lamongan | Lulus 2010 |
| b. Madrasah Diniyah Maslakul Huda | Lulus 2010 |
| c. Kursus Bahasa Inggris HEC 1 Pare | Lulus 2011 |
| d. Kursus Bahasa Arab Latansa Pare | Lulus 2011 |
| e. Kursus Bahasa Asing (KBA) Mandarin UMM | Lulus 2013 |

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- | | |
|--|---------|
| 1. FORKES UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Anggota |
| 2. KOPMA PB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Anggota |

- | | |
|--|------------------|
| 3. SEO UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Anggota |
| 4. IMADA (Ikatan Mahasiswa Alumni Maslakul Huda) | Pendiri/Pengurus |

D. PENGALAMAN LAIN

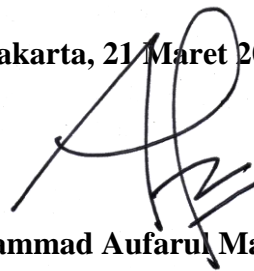
- | | |
|---|------------|
| 1. Pengabdian Masyarakat di Desa Dempok, Kec. Pagak,
Kab. Malang | Tahun 2013 |
| 2. PKLI di PA Kraksaan, Kab.Probolinggo | Tahun 2014 |
| 3. <i>Visiting Student</i> Di Universiti Utara Malaysia | Tahun 2014 |
| 4. Pelatihan BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta | Tahun 2016 |

E. KARYA ILMIAH

1. Artikel
 - a. Misunderstanding of People about Letter of Check
 - b. Electronic Money
2. Penelitian

The Practice of Cashing in Invoice in Brondong Nusantara Fish Auction Centre under Perspective of Burgerlijk wetboek and Fatwa DSN MUI Concerning Hawalah

Yogyakarta, 21 Maret 2017



Muhammad Aufarul Mawahib, S.H.I

NIM 1520310008